Katalog: 9102059.8202

SENSUS EKONOMI 2016

SENSUS EKONOMI 2016

ANALISIS HASIL *LISTING*

POTENSI EKONOMI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

SENSUS EKONOMI 2016

ANALISIS HASIL *LISTING*

POTENSI EKONOMI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil Listing
Potensi Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah

ISBN : 978-602-6621-13-9
No. Publikasi : 82020.1724
Katalog BPS : 9102059.8202
Ukuran Buku : 17.6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : x + 53 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah
Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah
Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah
Dicetak oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Tim Penyusun

Pengarah
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Editor
Erna Suprihartiningsih, SST

Penulis
Ilham Sanjaya, SST

Pengolah data
Ilham Sanjaya, SST

Desain dan Tata Letak Layout
Ilham Sanjaya, SST

Kontributor Data
Sekretariat SE2016 BPS Kabupaten Halmahera Tengah

Kata Pengantar

Sesuai amanat undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016). Pelaksanaan SE2016 dilakukan dalam beberapa tahapan, salah satunya adalah listing atau pendaftaran usaha/perusahaan (SE2016-L). Listing merupakan kegiatan pendataan secara lengkap seluruh kegiatan unit usaha/perusahaan di wilayah Indonesia kecuali kegiatan Pertanian, Kehutanan, & Perikanan dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial wajib. Tujuannya adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai unit usaha/perusahaan beserta karakteristik usahanya. Dengan ketersediaan data yang lengkap mencakup seluruh wilayah Indonesia, maka hasil SE2016-L dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas usaha yang potensial baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun penyediaan lapangan usaha.Publikasi Potensi Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 ditujukan untuk memperoleh gambaran dan informasi potensi ekonomi yang ada di kabupaten Halmahera Tengah. Informasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengevaluasi program-program terkait pengembangan potensi wilayah yang sudah dilakukan selama ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-L hingga penyusunan publikasi ini dapat terlaksana. Semoga publikasi ini dapat memberi manfaat kepada segenap penggunanya.

Halmahera Tengah, Desember 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Halmahera Tengah

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Kategori Cakupan Sensus Ekonomi 2016

Kategori B : Pertambangan dan Penggalian

Kategori C : Industri Pengolahan

Kategori D : Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin

Kategori E : Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi

Kategori F : Konstruksi

Kategori G : Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor

Kategori H : Pengangkutan dan Pergudangan

Kategori I : Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Kategori J : Informasi dan Komunikasi

Kategori K : Aktivitas Keuangan dan Asuransi

Kategori L : Real Estat

Kategori M : Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis

Kategori N : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya

Kategori P : Pendidikan

Kategori Q : Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial

Kategori R : Kesenian,Hiburan dan Rekreasi

Kategori S : Aktivitas Jasa Lainnya

Kategori U : Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Daftar Isi

Potensi Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah

Potensi Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah

A. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MELIMPAH

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Peran manusia sangat krusial dalam menjalankan pembangunan dan mengelola sumber daya alam (SDA) guna peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Sumber daya alam (SDA) yang melimpah tidak akan memberikan kontribusi secara ekonomi terhadap pembangunan tanpa peran serta manusia di dalamnya. Sejarah membuktikan bahwa kemajuan suatu negara lebih disebabkan oleh kemampuan manusianya dalam mengelola potensi sumber daya alam dibandingkan dengan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki. Bahkan beberapa negara maju dengan keterbatasan sumber daya alam namun memiliki sumber daya manusia yang berkualitas justru mampu melakukan ekspansi dalam pengolahan sumber daya alam negara lain untuk peningkatan pendapatan dan kemakmuran negaranya.

Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya menghampar di pesisir pantai, Kabupaten Halmahera Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah. Daratan di Provinsi Maluku Utara sangat produktif ditanami berbagai komoditas pertanian terutama perkebunan, seperti cengkeh, pala, kelapa, kakao. Di dalam perutnya mengandung aneka barang tambang seperti nikel, emas, perak, pasir besi, sedangkan potensi kelautannya tidak diragukan lagi dengan berbagai macam keanekaragaman biota laut yang dimiliki.

Gambar 1.1. Jumlah Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Halmahera Tengah , 2011-2015
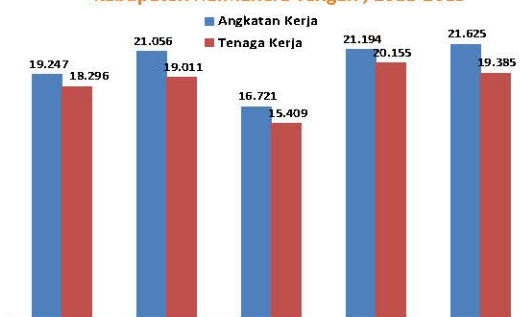
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2011-2015

Kabupaten Halmahera Tengah merupakan Kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten ini memiliki geliat ekonomi yang cukup untuk diperhitungkan. Selain itu angkatan kerja di suatu wilayah merupakan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut untuk ikut andil dalam hal pembangunan di wilayah itu sendiri. Tercatat berdasarkan hasil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Tengah. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2011 sebesar 19.247 jiwa. Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, sebesar 95,06 persen nya merupakan tenaga kerja, artinya hampir seluruh angkatan kerja tersebut merupakan sumber daya potensial untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Pada tahun-tahun berikutnya pun persentase tenaga kerja dari angkatan kerja nilainya selalu diatas 80 persen yaitu 90,29 persen, 92,15 persen, 95,10 persen dan 89,64 persen. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2

Gambar 1.2

Gambar 1.2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (persen), 2011-2015
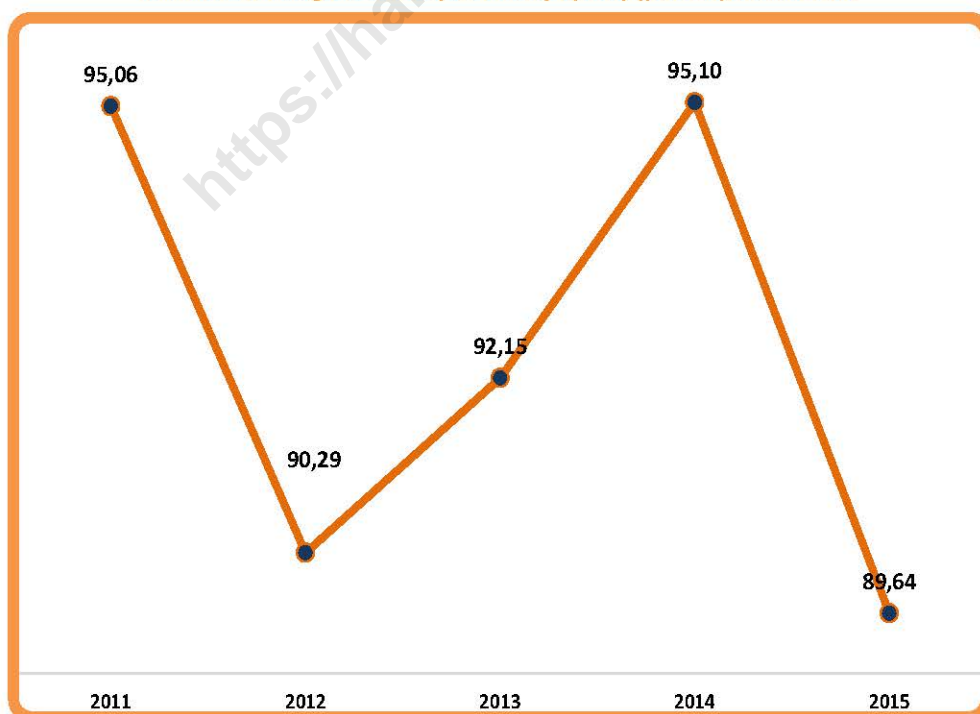
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2011-2015

B. Usaha Mikro Kecil menjadi sumber mata pencaharian Utama

Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, dengan kriteria jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang dan memiliki kekayaan paling banyak 500.000.000 rupiah. Secara umum, usaha Mikro Kecil masih menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dari Proporsinya yang mendominasi sebesar 87,16 persen dari seluruh tenaga kerja di Kabupaten Halmahera Tengah. Proporsi usaha/perusahaan skala Mikro Kecil juga mendominasi jumlah seluruh usaha/ perusahaan di kabupaten Halmahera tengah, yaitu sebesar 98,79 persen dari keseluruhan usaha/perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2016. Hal tersebut menandakan bahwa

Gambar 1.3
Persentase usaha/perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan skala usaha Hasil Sensus Ekonomi 2016
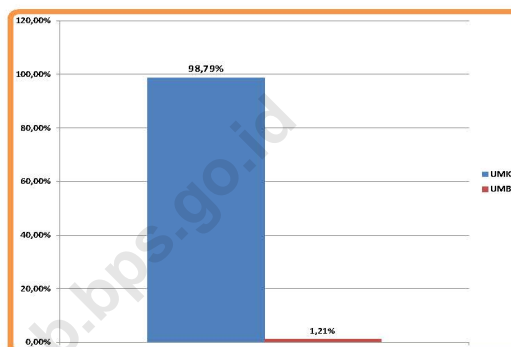
Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah hendaknya memprioritaskan Usaha Mikro Kecil sebagai program pembangunan yang harus dilakukan. Berdasarkan Hasil Listing Sensus Ekonomi Tahun 2016, Tenaga kerja skala Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Halmahera Tengah berjumlah 7.601 orang atau sekitar 87,16 persen sedangkan Tenaga Kerja skala Usaha Menengah Besar berjumlah 1.120 orang atau sekitar 12,84 persen. UMK tidak hanya merupakan tumpuan mata pencaharian penduduk Indonesia tetapi juga sumber aktivitas yang memperkuat sendi perekonomian baik pada tingkat nasional mupun regional. Beberapa penelitian membuktikan bahwa UMK merupakan usaha yang memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi terhadap goncangan ekonomi global. Proteksi ekonomi dan penguatan investasi pada skala usaha mikro kecil harus tetap diperkuat untuk mendukung keberlanjutan perekonomian bangsa.

Gambar 1.4
Persentase Tenaga Kerja menurut skala usaha di Kabupaten Halmahera Tengah, 2016

Sumber: Hasil SE2016 Listing

C. Kondisi Perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah.

Peningkatan perekonomian di Provinsi Maluku Utara dapat tercermin dari meningkatnya jumlah usaha/ perusahaan dan jumlah tenaga kerja pada berbagai sektor lapangan usaha. Jumlah usaha/perusahaan meningkat sebesar 57,74 persen dari sebanyak 52.368 usaha/perusahaan di tahun 2006 menjadi sebanyak 82.603 usaha/perusahaan di tahun 2016. Sedangkan peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 61,93 persen dari sebanyak 123.982 jiwa pada tahun 2006 menjadi sebanyak 200.760 jiwa pada tahun 2016.

Peningkatan perekonomian Provinsi Maluku utara juga memberikan efek yang sejalan di Kabupaten-Kabupaten di bawahnya salah satunya Kabupaten Halmahera Tengah. Kabupaten yang secara de facto berdiri pada tahun 1969 ini mengalami peningkatan jumlah usaha sebesar 144,83 persen dari sebanyak 1.316 usaha/perusahaan pada tahun 2006 menjadi sebanyak 3.222 usaha/perusahaan pada tahun 2016. Demikian juga dengan jumlah tenaga kerja terjadi peningkatan sebesar 114,75 persen dari sebanyak 4.061 jiwa pada tahun 2006 menjadi sebanyak 8.721 jiwa pada tahun 2016.

Berdasarkan grafik 1.5 dapat dilihat bahwa Jumlah Tenaga Kerja yang paling banyak terdapat di Kota Ternate yaitu sebesar 53.385 jiwa dan jumlah tenaga kerja yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Pulau Taliabu yaitu sebesar 8.721 jiwa. Kabupaten Halmahera Tengah menempati urutan ke delapan dari sepuluh Kabupaten/Kota dalam hal jumlah Tenaga Kerja yaitu sebesar 8.721 jiwa.

Gambar 1.5
Jumlah Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Kabupaten/kota, 2016
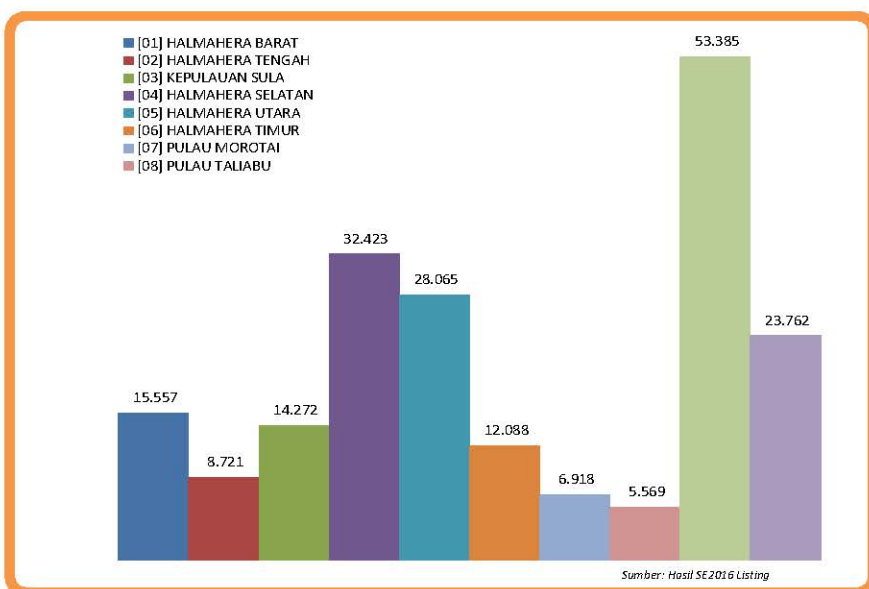
D. Distribusi Ekonomi dan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara

Pada tahun 2016, Produk Domestik regional bruto kabupaten Halmahera Tengah atas dasar harga Berlaku mencapai 1.769.299,6 juta atau sekitar 1.769,3 Miliar rupiah. Nilai ini menyumbang sekitar 6,04 persen dari keseluruhan PDRB Provinsi Maluku Utara yang mencapai 29.165,23 Miliar Rupiah. Share PDRB Kabupaten Halmahera Tengah menduduki peringkat ke delapan dari sepuluh Kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara diatas Kabupaten Pulau Morotai (4,11 persen) dan tepat di bawah Kabupaten Halmahera Barat (6,10 persen) lebih jelasnya dapat dilihat di gambar 1.6.

Penting untuk diketahui bahwa PDRB Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2016 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 senilai 1.262,01 miliar rupiah. Melalui nilai PDRB (ADHK) tahun 2010 ini bisa didapatkan angka pertumbuhan ekonomi. Yaitu selisih antara nilai PDRB ADHK tahun 2016 dengan PDRB ADHK tahun sebelumnya dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya dikalikan seratus persen. Lain halnya dengan share atau distribusi ekonomi, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten ini justru menempati peringkat tertinggi diantara Kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 11,25 persen. Pertumbuhan ini jauh diatas pertumbuhan total PDRB Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi maluku Utara yang hanya sebesar 5,77 persen. Pertumbuhan sebesar ini diduga berasal dari mulai beroperasinya pengolahan bijih nikel menjadi nikel setengah jadi serta mulai menggeliatnya kegiatan ekspor Nikel setengah jadi yang dilakukan oleh PT FBLN di Kecamatan Pulau Gebe ke negeri tirai bambu. Perlu untuk diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera tengah didapatkan dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010.

Gambar 1.6
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016

SUMBER, BPS PDRB KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 2016
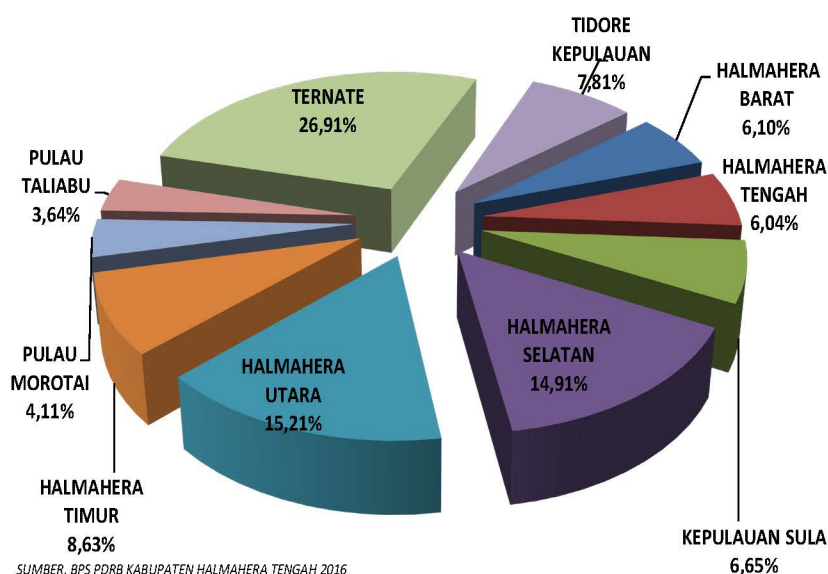
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa kontribusi PDRB tertinggi Provinsi Maluku Utara disumbang oleh Kota Ternate yaitu sebesar 26,91 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten halmahera Utara yaitu sebesar 15,21 persen. Kabupaten Halmahera Tengah memberikan kontribusi PDRB sebesar 6,04 persen yang merupakan urutan ke delapan dari sepuluh Kabupaten.

Berdasarkan gambar 1.7 dapat diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara berada pada level 5,77 persen. Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan Provinsi Maluku Utara diantaranya Kota Ternate, Pulau Morotai, dan Kabupaten Halmahera Tengah dimana nilai pertumbuhan masing-masing sebesar 8,02 persen, 6,29 persen, dan 11,25 persen. sedangkan Kabupaten/kota yang pertumbuhannya di bawah Provinsi Maluku Utara diantaranya Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Pulau Taliabu, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula dan Halmahera Barat. Dimana masing-masing pertumbuhannya sebesar 5,25 persen, 5,69 persen, 5,52 persen, 4,03 persen, 5,52 persen, 5,04 persen dan 5,14 persen. Kabupaten yang memiliki nilai pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Halmahera Tengah, dan kabupaten yang memiliki nilai pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Halmahera Utara.

Gambar 1.7
Perbandingan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara dengan Kabupaten/Kota di bawahnya Tahun 2016 (persen)
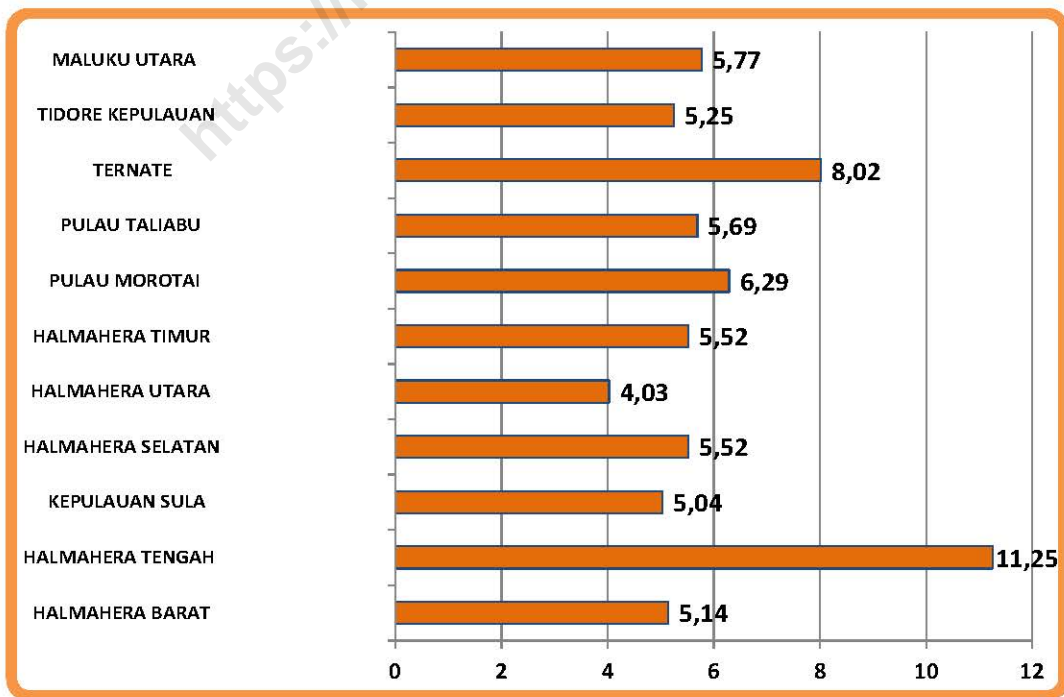
Sumber: BPS, PDRB PROVINSI MALUKU UTARA 2016 (DIOLAH)

Tantangan Perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah

Tantangan Perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah

A. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih harus ditingkatkan

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana utama untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan manusia yang secara empirik terbukti merupakan syarat perlu bagi pembangunan manusia. Dalam hal ini ketenagakerjaan merupakan jembatan utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapabilitas manusia (UNDP, 1996). Hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi bersifat double relationship of causality. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi meningkatkan pembangunan manusia sedangkan di sisi lain peningkatan status pembangunan manusia memungkinkan untuk pertumbuhan ekonomi (Boozer, Ranis, Stewart, & Suri, 2003). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran penting untuk mengindikasikan kemajuan dalam usaha meningkatkan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Tengah masih relatif rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Maluku Utara. IPM Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 63,05 lebih kecil daripada IPM Provinsi Maluku Utara yang sebesar 66,63. Padahal Sebagai kabupaten induk yang dimekarkan menjadi Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur, peringkat IPM Halmahera Tengah masih di bawah Kabupaten Halmahera Timur yang bertengger di posisi ke empat dan Kota Tidore Kepulauan yang menempati posisi runner up tepat di bawah posisi Kota Ternate.

Berdasarkan grafik 2.1 dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Halmahera Tengah masih harus lebih ditingkatkan lagi. Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak pernah sekolah dan tidak lulus SD merupakan kelompok masyarakat terbesar yaitu sebanyak 24,14 persen. berdasarkan grafik diatas juga dapat dikatakan bahwa hampir seperempat penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Halmahera Tengah tidak pernah sekolah dan tidak lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Pada era globalisasi saat ini, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan. Hal tersebut menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Halmahera tengah untuk tetap berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan penduduknya di tengah segala keterbatasan yang ada. Pendidikan meningkatkan modal manusia melalui tenaga kerja yaitu dalam hal produktivitasnya. Produktivitas yang meningkat akan mendorong terciptanya output lebih banyak (Mankiw 1992), pendidikan juga meningkatkan kapasitas inovasi. Link antara pendidikan (Sumber Daya Manusia) dalam pertumbuhan ekonomi tercantum dalam Endogenous growth theory (Lucas 1988, Romer 1990) dalam (Bandara, Dehejia,&Lavie-Rouse, 2014).

Gambar 2.1
Tingkat pendidikan Penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Halmahera Tengah
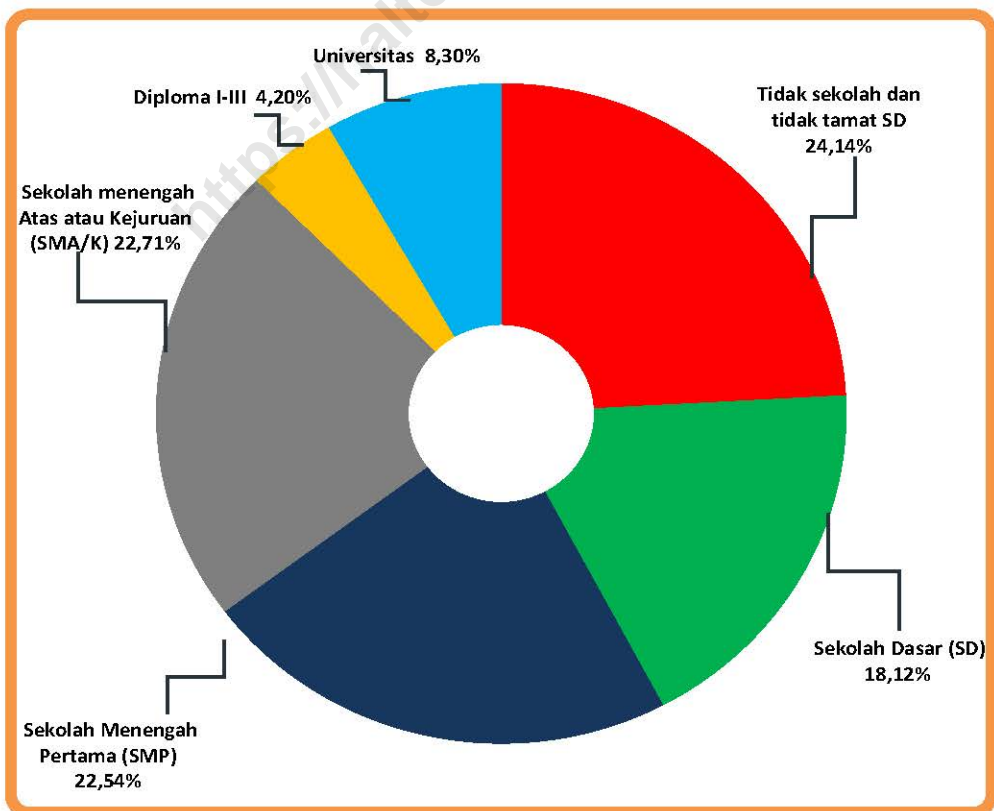
Sumber: BPS, Kabupaten Halmahera Tengah dalam Angka Tahun 2016

Jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di lingkup Provinsi Maluku Utara, IPM Kabupaten Halmahera berada di posisi keenam, lebih tinggi dari Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu. Peringkat pertama diraih oleh Kota Ternate diikuti Kota Tidore Kepulauan. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah setempat untuk lebih meningkatkan lagi program pembangunan yang lebih berpihak kepada pembangunan kualitas manusia.

Tabel 2.2
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016
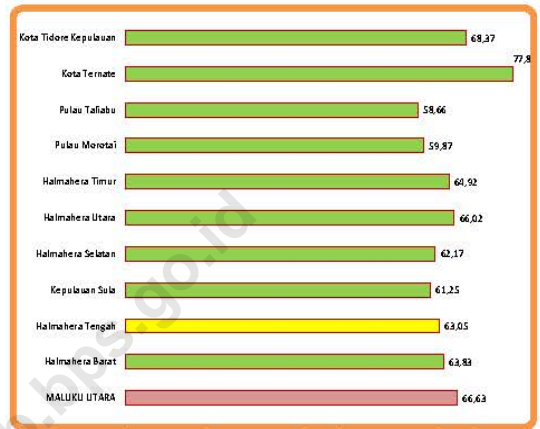
Sumber: BPS, IPM Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016

Gambar 2.3
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota se-Maluku Utara, 2016
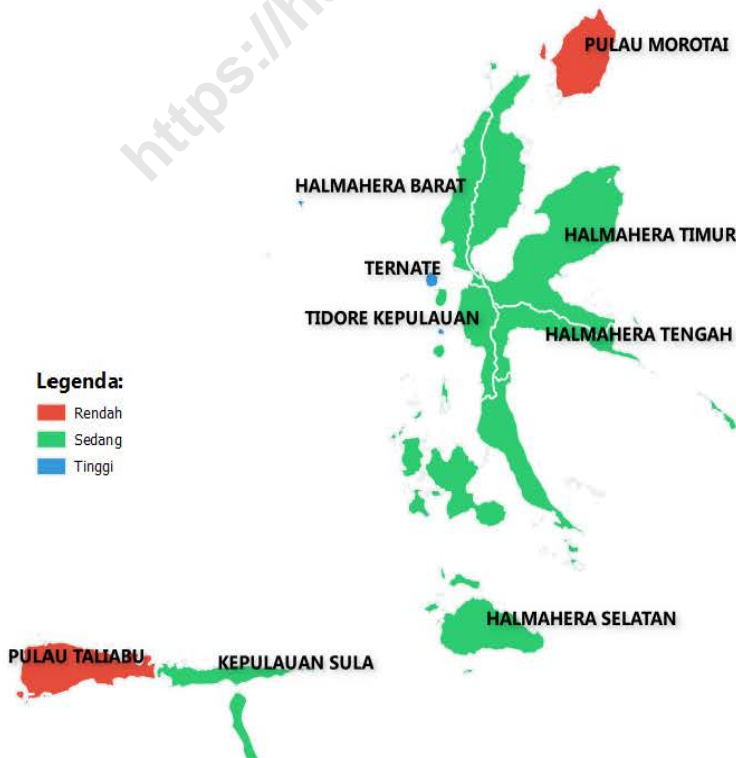
Sumber: BPS, IPM Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016

B. Infrastruktur Ekonomi yang terbatas

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Kwik Kian Gie, 2002). Keberadaan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, listrik dan lainnya menjadi hal yang penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan pekerjaan.

Salah satu tantangan perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah adalah infrastruktur yang masih terbatas di wilayah ini. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat Kabupaten halmahera Tengah adalah satu dari sekian banyak Kabupaten di wilayah Timur Indonesia Raya yang jauh jangkauannya dari ibukota Republik Indonesia, DKI jakarta. Memang jangkauan yang jauh dari ibukota RI tidak selalu menjadi alasan utama ketertinggalannya pembangunan di suatu daerah, namun kita juga tidak bisa menutup mata pembangunan infrastruktur membutuhkan bahan yang tidak semuanya bisa didapatkan di wilayah asal. Berdasarkan Gambar 2.4 Desa yang memiliki kelompok pertokoan dan pasar permanen di kabupaten Halmahera Tengah hanya 17,74 persen. artinya sebagian besar Desa di kabupaten Halmahera Tengah masih belum memiliki kelompok pertokoan dan pasar permanen. Suatu Desa yang memiliki pasar artinya terjadi kegiatan perekonomian yang aktif di wilayah tersebut karena masyarakat akan melakukan transaksi perekonomian lebih sering di pasar. Suatu desa yang tidak memiliki pasar artinya kegiatan perekonomian di Desa tersebut cenderung lambat karena masyarakat akan pergi ke Desa yang ada pasarnya untuk melakukan transaksi perekonomian.

Tabel 2.4
Persentase Desa yang memiliki kelompok pertokoan dan pasar permanen dan persentase Desa dengan jalan terluasnya aspal/beton di Kabupaten Halmahera Tengah
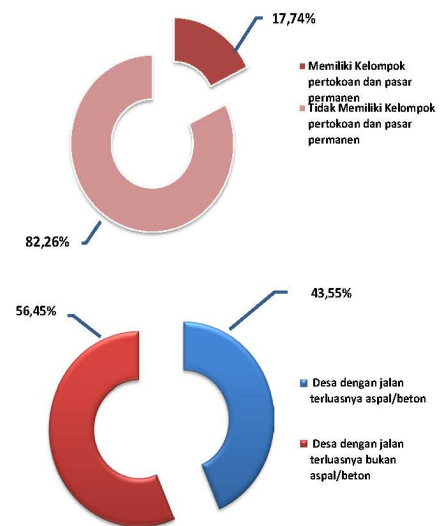
Sumber: BPS, Podes 2014

Jalan aspal/beton memudahkan akses masyarakat dalam melakukan mobilisasi baik itu mobilisasi manusia atau mobilisasi barang. Suatu desa yang memiliki kemudahan dalam transportasi baik menuju atau meninggalkan Desa tersebut memungkinkan pembangunan perekonomian berjalan lebih cepat. Karena masyarakat memiliki kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa persentase desa dengan jalan terluasnya aspal/beton masih lebih sedikit bila dibandingkan dengan yang bukan aspal/beton. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah setempat umumnya dan dinas terkait khususnya untuk membuat akses untuk menuju desa bebas lumpur dan licin bila musim hujan tiba.

Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. (Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2)). Berdasarkan pengertiannya tersebut, diharapkan suatu wilayah yang terdapat banka didalamnya diharapkan taraf hidup masyarakatnya meningkat.

Peran perbankan dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah sangatlah besar. Jasa perbankan mempunyai dua tujuan yaitu sebagai penyedia alat pembayaran yang efisien bagi nasabah berupa uang tunai, tabungan dan kredit serta menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali melalui investasi yang produktif. Terkait dengan hal tersebut, muncul tantangan yang harus dihadapi perbankan di Kabupaten Halmahera Tengah yaitu meningkatkan peransertanya dalam perputaran ekonomi daerah. Hal ini merupakan perkerjaan yang cukup berat mengingat pada tahun 2014 baru 3,23 persen desa yang memiliki ketersediaan bank di wilayahnya. Dan sebanyak 96,77 persen Desa di kabupaten ini belum terdapat bank.

Tabel 2.5
Persentase Desa yang mempunyai bank di Kabupaten Halmahera Tengah
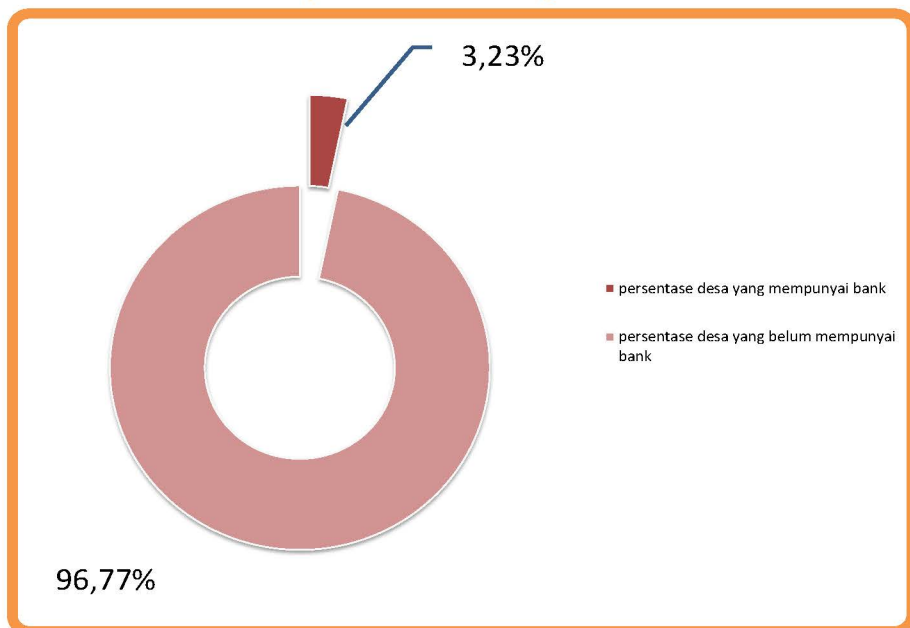
Sumber: BPS, Podes 2014

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Pembangunan

PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL UNTUK PEMBANGUNAN

A. Penggerak utama perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah

Pembangunan ekonomi di suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga memperluas pilihan masyarakat secara merata di wilayah tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah daerah dan masyarakat perlu memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal. Sjafrizal (1997) mengatakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, kebijaksanaan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini perlu diusahakan karena potensi pembangunan yang dihadapi oleh masing-masing daerah sangat beragam. Apabila prioritas pembangunan wilayah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, maka sumber daya yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keadaan tersebut akan mengakibatkan relatif lambatnya laju pertumbuhan ekonomi wilayah bersangkutan.

Tabel 3.1
Pertumbuhan PDRB beberapa Kategori Lapangan Usaha di Kabupaten Halmahera Tengah

No.	Kategori Lapangan Usaha	Pertumbuhan 2016 (persen)
(1)	(2)	(3)
1	B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	1,46
2	C. Industri Pengolahan	280,06
3	F. Konstruksi	4,02
4	G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	4,09
5	H, J. Pengangkutan dan pergudangan, Informasi dan Komunikasi	4,51
6	I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	3,34
7	K, L, M, N. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan	5,80
8	P. Pendidikan	3,74
9	Q, R, S, U. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial, Jasa Lainnya	4,88

Sumber: BPS, PDRB Lapangan Usaha 2016 (diolah)

Kontribusi perekonomian di suatu daerah dapat diamati dalam tingginya share setiap sektor terhadap jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Parameter ini merupakan petunjuk substansial untuk mendapatkan informasi sektor yang merupakan penggerak utama perekonomian di suatu daerah. Dengan kata lain, secara kuantitas, aktivitas ekonomi yang paling banyak dijalankan adalah Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (Kategori G) sebesar 30,09 persen. Kemudian, konstruksi (Kategori F) dan pendidikan (Kategori P) merupakan aktivitas ekonomi terbesar kedua dan ketiga yang dijalankan oleh masing-masing sekitar 17 dan 15 persen.

Gambar 3.1
Distribusi Tenaga Kerja menurut Kategori Lapangan Usaha di Kabupaten Halmahera Tengah, 2016
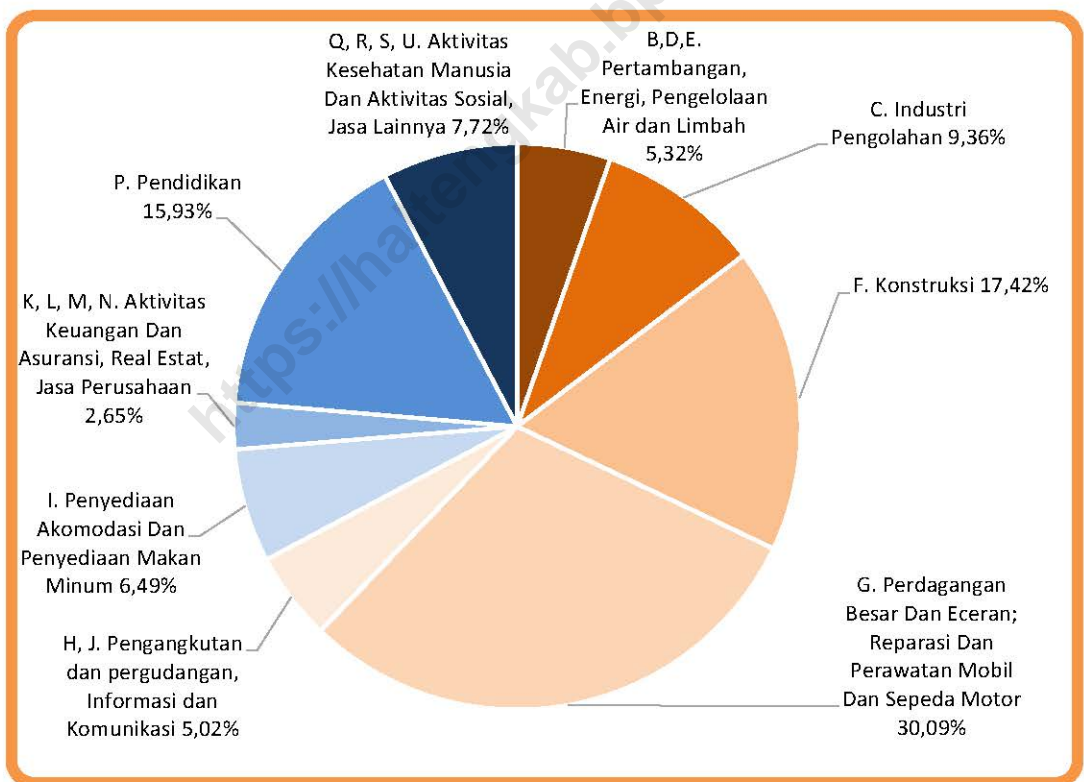
Sumber: BPS, SE2016 Listing

Berdasarkan gambar 3.2 dapat diketahui bahwa distribusi perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2016 sebagian besar disumbang oleh sektor Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor yaitu sebesar 27,39 persen. kemudian disusul oleh sektor Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah (B,D,E) yaitu sebesar 25,35 persen.

Gambar 3.2
Distribusi PDRB menurut Kategori Lapangan Usaha di Kabupaten Halmahera Tengah, 2016
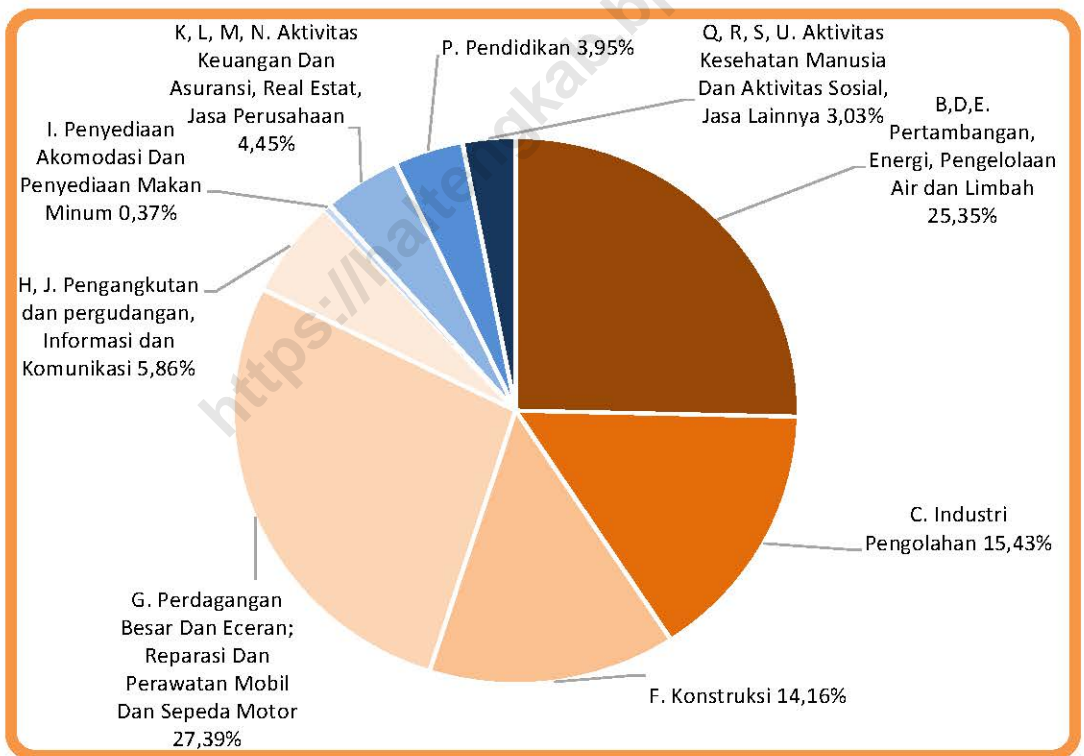
Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016 (diolah)

B. Potensi Ekonomi Regional

Sektor ekonomi potensial menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi di kabupaten/kota. Kabupaten/kota akan berkembang apabila memiliki sektor basis yang terkonsentrasi di kabupaten/kota tersebut dan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dari sektor yang sama di tingkat provinsi, serta memiliki keunggulan komparatif. Soepono (1993) menyatakan bahwa jika suatu wilayah memiliki spesialisasi pada sektor tertentu maka wilayah tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif dari spesialisasi sektor tersebut. Kabupaten/kota perlu memprioritaskan pengembangan sektor ekonomi melalui kebijakan yang mendukung kemajuan sektor tersebut melalui investasi dan peningkatan sumber daya manusia pada sektor tersebut.

Untuk menentukan suatu sektor potensial untuk dikembangkan maka akan menggunakan alat analisis antara lain analisis Location Quotient (LQ), analisis Shift Share, analisis model rasio pertumbuhan (MRP), tipologi Klassen.

Analisis Location Quation (LQ)

Analisis LQ merupakan alat analisis untuk menentukan sektor basis atau non-basis. Arsyad (1999) menyatakan bahwa LQ dapat membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua kelompok yaitu:

1. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Sektor ekonomi seperti ini dinamakan sektor ekonomi potensial (basis)
2. Kegiatan sektor ekonomi yang hanya melayani pasar di daerah tersebut dinamakan sektor tidak potensial (non basis).

Data yang digunakan dalam analisis LQ adalah data jumlah tenaga kerja hasil SE 2016. Rumus untuk menghitung LQ adalah sebagai berikut :

Dimana :

Sij : Jumlah usaha/tenaga kerja pada sektor i pada wilayah analisis j.

Sj : Jumlah usaha/tenaga kerja pada wilayah analisis j.

Sin : Jumlah usaha/tenaga kerja pada sektor i di wilayah referensi.

Sn : Jumlah usaha/tenaga kerja di wilayah referensi.

Jika nilai LQ lebih besar daripada satu menunjukkan sektor tersebut memiliki potensi dan prospek yang besar didalam perekonomian suatu daerah atau bisa disebut sektor ini merupakan sektor basis. Sebaliknya, jika nilai LQ kurang dari satu menunjukkan sektor tersebut kurang berpotensi atau kurang berprospek sehingga dapat juga disebut sebagai sektor non basis.

Analisis Shift Share

Analisis Shift Share merupakan teknik kuantitatif untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas sebagai referensi.Terdapat 3 bagian dalam analisis ini, sebagi berikut :

1. Regional Share (RS) merupakan komponen share pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor eksternal. RS mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijakan nasional yang berlaku.
2. Proporsional Shift (PS) komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah tersebut yang baik, dengan berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat
3. Differential Shift (DS) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keunggulan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah.

Shift Share(SS) merupakan penjumlahan dari Regional Share dengan Proportional Share dan Differential Share

Rumus untuk menghitung analisis shift share adalah

$$RS_{ij} = y_{ijo}\left(\frac{Y_t}{Y_0} - 1\right)$$

$$PS_{ij} = y_{ijo}\left(\frac{y_{it}}{y_{io}} - \frac{Y_t}{Y_0}\right)$$

$$DS_{ij} = y_{ijo}\left(\frac{y_{ijt}}{y_{ijo}} - \frac{y_{it}}{y_{io}}\right)$$

$$SS_{ij} = RS_{ij} + PS_{ij} + DS_{ij}$$

Dengan

Yt = PDB wilayah referensi periode akhir tahun.
Y0 = PDB wilayah referensi periode awal tahun.
yit = PDB wilayah referensi sektor ke-i periode tahun akhir.
yi0 = PDB wilayah referensi sektor ke-i periode tahun awal.
yijt = PDRB wilayah analisis sektor ke-i periode tahun akhir.
yij0 = PDRB wilayah analisis sektor ke-i periode tahun awal.

- Jika PSij > 0, artinya sektor i pada suatu wilayah analisis tumbuh lebih cepat daripada sektor i di wilayah referensi, dan sebaliknya.
- Jika DSij > 0, artinya daya saing sektor i pada suatu wilayah analisis lebih tinggi dari daya saing sektor i di wilayah referensi, dan sebaliknya.
- Jika SSij > 0, artinya terjadi penambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja ekonomi daerah pada sektor i di wilayah analisis tersebut.

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis MRP mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (competitive advantage).
Rumus untuk menghitung analisis MRP adalah :

$$RP_{ip} = \frac{(y_{ipt} - y_{ip0})/y_{ipt}}{(y_{pt} - y_{p0})/y_{p0}}$$

$$RP_{in} = \frac{(y_{int} - y_{in0})/y_{int}}{(y_{nt} - y_{n0})/y_{n0}}$$

Dimana
yipt = PDRB sektor i wilayah analisis ke p pada periode tahun akhir.
yip0 = PDRB sektor i wilayah analisis ke p pada periode tahun awal.
ypt = PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun akhir.
yp0 = PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun awal.
yint = PDRB sektor i wilayah referensi pada periode tahun akhir.
yin0 = PDRB sektor i wilayah referensi pada periode tahun awal.
ynt = PDRB wilayah referensi pada periode tahun akhir.
yn0 = PDRB wilayah referensi pada periode tahun awal.

- Jika nilai RPip > 1 dan RPin >1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama tinggi, sektor tersebut merupakan potensi baik di tingkat regional maupun global (di level wilayah referensinya)
- Jika nilai RPip > 1 dan RPin < 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih tinggi dari wilayah referensi sektor tersebut merupakan potensi di tingkat regional namun secara global tidak berpotensi
- Jika nilai RPip < 1 dan RPin > 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih rendah dari wilayah referensi sektor tersebut merupakan potensi di tingkat global namun secara regional tidak berpotensi
- Jika nilai RPip < 1 dan RPin < 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama rendah sektor tersebut tidak berpotensi baik di tingkat regional maupun global (wilayah referensi)

Analisis Tipologi Klassen

Analisis tipologi Klassen bertujuan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor tersebut dalam membentuk perekonomian di suatu wilayah.
Untuk menentukan sektor yang mengalami pertumbuhan digunakan matriks:

Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	
	$G_i \geq G$	$G_i < G$
$S_i \geq S$	**Sektor unggulan dan tumbuh pesat**	Sektor unggulan tetapi pertumbuhannya tertekan
$S_i < S$	Sektor potensial dan masih dapat dikembangkan	Bukan sektor potensial dan tertinggal

Dimana
Gi : Pertumbuhan sektor i di wilayah analisis
G : Pertumbuhan sektor i di wilayah referensi
Si : Kontribusi sektor i di wilayah analisis
S : Kontribusi sektor i di wilayah referensi

- Daerah maju dan tumbuh cepat (rapid growth region) apabila kabupaten/kota memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Provinsi;
- Daerah maju tapi tertekan (retarded region) apabila laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lebih kecil dari pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi akan tetapi pendapatan per kapita kabupaten/kota lebih besar dari pendapatan per kapita Provinsi;
- Daerah berkembang cepat (growing region) yaitu daerah yang berkembang dengan cepat apabila laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi akan tetapi pendapatan per kapita kabupaten/kota lebih rendah dari pendapatan per kapita Provinsi;
- Daerah relatif tertinggal (relatively backward region) apabila kabupaten/kota memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Provinsi.

Berdasarkan hasil keempat metode analisis di atas maka didapatkan Hasil Sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis LQ sektor yang pertumbuhannya unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Halmahera Tengah adalah sektor B,D,E. (Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah), sektor F (konstruksi), dan sektor Q, R, S, U (Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial, Jasa Lainnya)
2. Berdasarkan metode Shift Share sektor yang memiliki pertumbuhan yang pesat adalah sektor B,D,E (Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah) dan sektor G (Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor)
3. Berdasarkan analisis MRP Sektor di Kabupaten Halmahera Tengah yang memiliki potensi baik di tingkat antar Kabupaten maupun Provinsi Maluku Utara adalah sektor F (Konstruksi), G (Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor), H&J (Pengangkutan dan pergudangan, Informasi dan Komunikasi), K, L, M, N (Aktivitas Keuangan Dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan), Q, R, S, U (Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial, Jasa Lainnya
4. Berdasarkan Metode Klassen, sektor yang memiliki keunggulan dan tumbuh pesat di kabupaten Halmahera Tengah adalah sektor C (industri pengolahan)
5. Kesimpulan: Kabupaten Halmahera Tengah perlu memprioritaskan sektor konstruksi dan sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, jasa lainnya sebagai sektor potensial. Sektor ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 17% dan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 14% di luar sektor pertanian. Sektor ini merupakan sektor basis/potensial yang mampu melayani pasar baik di dalam Kabupaten Halmahera Tengah sendiri maupun pasar di Provinsi Maluku Utara. Sektor ini juga memiliki laju pertumbuhan yang sangat baik karena merupakan potensi baik di tingkat lokal Halmahera Tengah maupun regional Maluku Utara.

Peran Konstruksi Bagi Pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah

Peran Konstruksi bagi pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah

A. Kontribusi Konstruksi bagi Perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kategori konstruksi memberikan share perekonomian di luar sektor pertanian dan administrasi pemerintahan kepada Kabupaten Halmahera Tengah selalu diatas 10 persen. Pada tahun 2012, sektor ini memberikan share sebesar 12,65 persen. Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 share nya secara berturut turut sebesar 12,57; 14,88; 15,71; dan 14,61 persen. Hal tersebut menandakan bahwa sektor ini merupakan salah satu sektor yang memegang peran yang sangat penting bagi Kabupaten Halmahera Tengah. Berdasarkan grafik 4.1 dapat dilihat bahwa sektor konstruksi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan baik dari sisi Harga Konstan maupun Harga Berlaku.

Gambar 4.1
PDRB Kategori Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah (Miliar Rupiah),
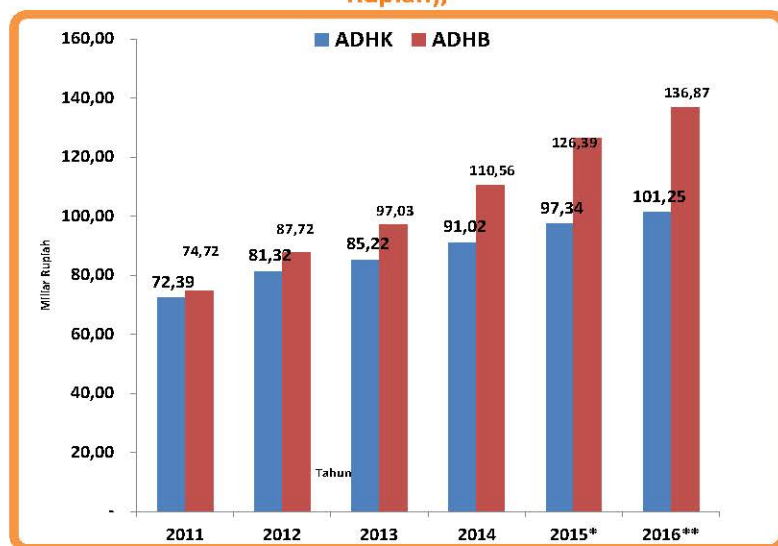
Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016 (diolah)

Berdasarkan gambar 4.1 diatas kita dapat mengetahui nilai tambah sektor konstruksi di Kabupaten Halmahera Tengah dalam lima tahun terakhir. Baik menurut Harga Berlaku maupun menurut harga Konstan Tahun 2010, nilai tambah sektor unggulan di kabupaten Halmahera Tengah ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi pembangunan yang terus menerus dan berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Tengah. Pada tahun 2011 nilai tambah kategori konstruksi di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 72,39 miliar rupiah (ADHK) dan 74,72 miliar Atas dasar Harga Berlaku dan terus meningkat pada tahun tahun berikutnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kabupaten Halmahera Tengah pernah mendapatkan peringkat 5 se Indonesia, atas penilaian Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal keberhasilan membangun infrastruktur jalan dan jembatan.

Berdasarkan gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa berkat pembangunan sektor konstruksi di Kabupaten Halmahera Tengah sebagian besar jalan di Kabupaten Halmahera Tengah berkualitas baik dan sedang yaitu 43,54 persen. dengan akses jalan yang sebagian besar berkualitas layak tersebut menunjang berbagai aktivitas masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah baik dalam hal ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Gambar 4.2
Persentase Panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Halmahera Tengah, 2016
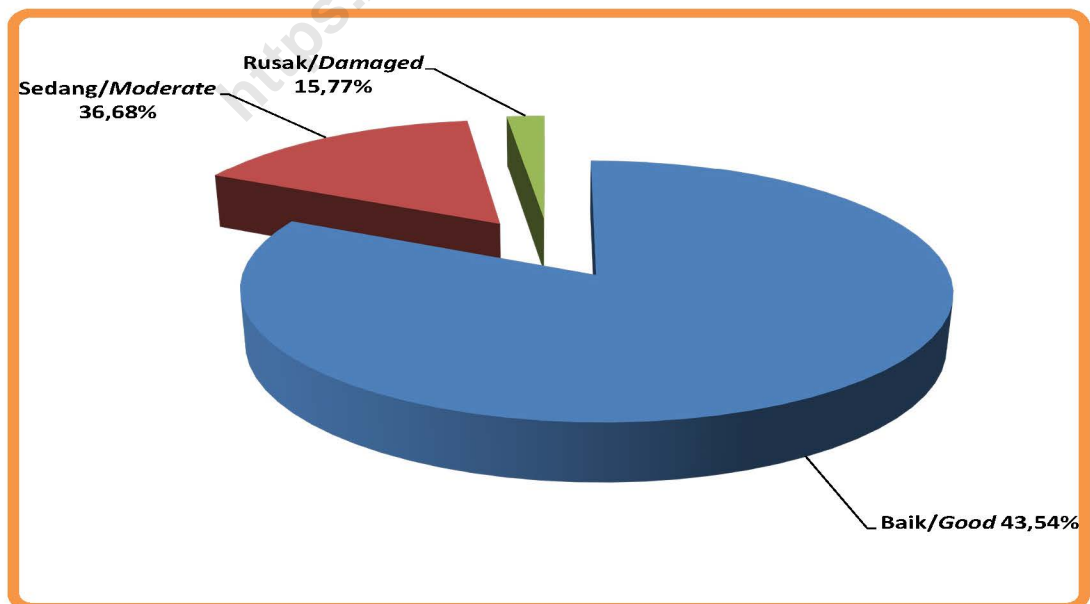
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Melalui Survei Kompilasi Data Transportasi Panjang jalan (PJ II/5)

B. Karakteristik Usaha

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa dalam beberapa kurun waktu terakhir, share kategori konstruksi terhadap total PDRB Kabupaten Halmahera Tengah selalu diatas 11 persen. Hal ini menandakan bahwa kategori konstruksi memegang peranan yang cukup penting bagi perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah. Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan kategori Konstruksi selalu menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun artinya terdapat pertumbuhan yang cukup signifikan antara satu tahun dengan tahun sebelumnya.

C. Program Pengembangan Sektoral Pemerintah Daerah

Urusan Pekerjaan Umum, meliputi :
A. Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran;
B. Program Sarana dan Prasarana Aparatur;
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia;
D. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Perumahan;
E. Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
F. Program Pengelolaan Air Limbah; dan
G. Program Pembangunan dan Peningkatan Pemeliharaan drainase jalan dan lingkungan, serta irigasi.

Urusan Pekerjaan Umum,
Sub. Urusan Kantor Pelayanan Air Minum, meliputi:
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
B. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur;
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
D. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daya Aparatur;
E. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum;
G. Program Operasional Produksi dan pengolahan Air Minum; dan
H. Program Pemeliharaan Instalasi Air Minum.

Gambar 4.3
Kontribusi (atas) dan Laju Pertumbuhan (bawah) Kategori konstruksi bagi perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah
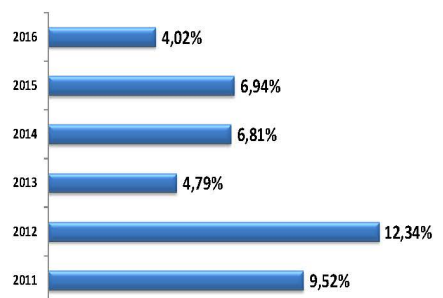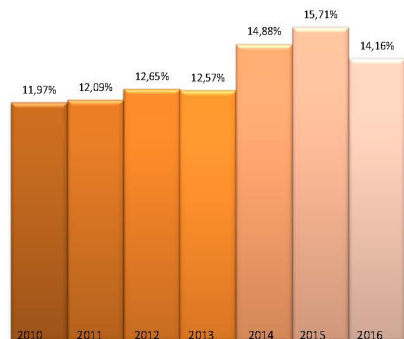
Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016 (diolah)

AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL, DAN JASA LAINNYA DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL, DAN JASA LAINNYA DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

A. Karakteristik Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan aktivitas sosial, dan jasa lainnya

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tenaga kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial. Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga.

Gambar 5.1
PDRB Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan aktivitas Sosial, Jasa Lainnya Kabupaten Halmahera Tengah (Miliar Rupiah), 2010-2016**
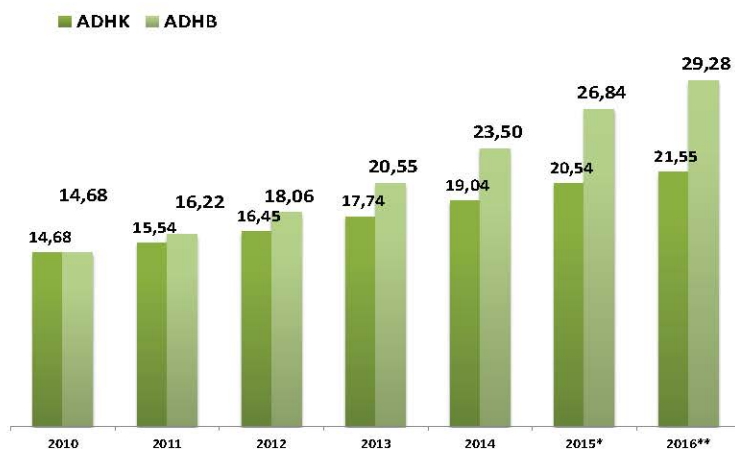
Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016 (diolah)

Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, nilai nominal PDRB Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial, Jasa Lainnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. pada tahun 2010 berdasarkan atas harga berlaku, nilai nominal kategori ini mencapai 14,68 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 16,22 miliar di tahun berikutnya. Sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan sebesar 29.28 miliar rupiah.

Berdasarkan atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, nilai nominal kategori ini mencapai 20,54 miliar pada tahun 2015 dan meningkat lagi menjadi 21,55 miliar pada tahun 2016.

Berdasarkan penghitungan analisis LQ dan Model rasio Pertumbuhan (MRP) didapatkan nilai sebagaimana pada tabel 5.1

1. Nilai LQ sebesar 1,59 artinya Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial, Jasa Lainnya di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah merupakan kategori unggulan.
2. Nilai RPip (Rasio Pertumbuhan wilayah Analisis)> 1 (1,46) dan Rpin (Rasio Pertumbuhan wilayah referensi)>1 (1,07) maka pertumbuhan Kategori . Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial, Jasa Lainnya di wilayah analisis (Kabupaten Halmahera Tengah) dan wilayah referensi (Provinsi Maluku Utara) sama-sama tinggi sehingga kategori tersebut merupakan potensi baik di tingkat Kabupaten maupun provinsi.

Tabel 5.1
Hasil penghitungan uji LQ dan MRP untuk kategori Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial, Jasa Lainnya di Kabupaten Halmahera Tengah

No.	Kategori Lapangan Usaha	LQ	RPip	RPin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Q, R, S, U. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial, Jasa Lainnya	1.59	1,46	1.07

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016 dan Listing SE2016 (diolah)

B. Karakteristik Usaha

Berdasarkan gambar 5.1 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial, Jasa Lainnya selalu menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun artinya terdapat pertumbuhan yang cukup signifikan antara satu tahun dengan tahun sebelumnya.

C.Program Pengembangan Sektoral Pemerintah Daerah

1. Urusan Kesehatan,meliputi :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
d. Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat;
e. Program Kesehatan Anak Sekolah;
f. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular;
g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
j. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
k. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kesehatan;
l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
m. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Perbaikan; dan
n. Program Pengawasan Obat dan Makanan.

1.1 Urusan Kesehatan Sub. Urusan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), meliputi :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur;
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
d. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan;
e. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; dan
f. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.

Gambar 5.2
Laju pertumbuhan Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial, Jasa Lainnya Kabupaten Halmahera Tengah 2011-2016
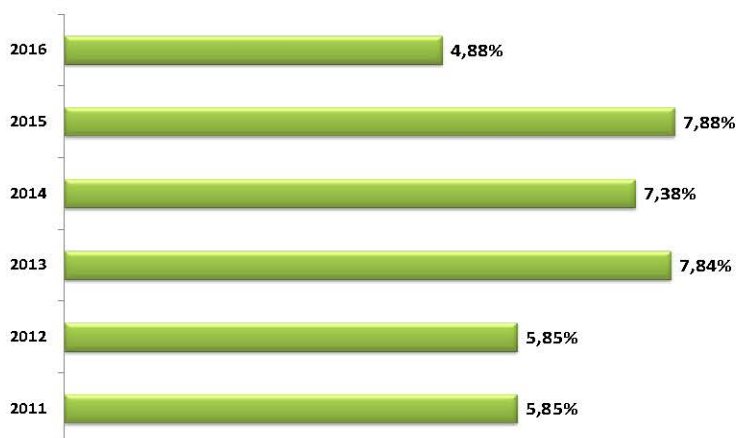
Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016 (diolah)

GELIAT PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Geliat Pertambangan, Energi, pengelolaan air dan limbah di Kabupaten Halmahera Tengah

A. KARAKTERISTIK KATEGORI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Berdasarkan penghitungan analisis LQ dan Shift Share (SS) didapatkan nilai sebagaimana pada tabel 6.1

1. Nilai LQ sebesar 1,50 (LQ>1) artinya Kategori Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah merupakan kategori unggulan.

2. Nilai SS sebesar 160.380,53 (Shift Share>1) artinya terjadinya penambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja ekonomi daerah pada Kategori Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.

Gambar 6.1
Hasil penghitungan uji LQ dan Shift Share kategori Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah di Kabupaten Halmahera Tengah

No.	Kategori Lapangan Usaha	LQ	Shift Share (SS)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	1.50	160.380,53

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016 dan Listing SE2016 (diolah)

Berdasarkan gambar 6.1 dapat dilihat bahwa kontribusi Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah dari tahun 2010 sampai 2016 tetap berada di atas 20 persen setiap tahunnya. Atau secara rata-rata kontribusi sektor Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah terhadap perekonomian Halmahera tengah dari tahun 2010 sampai 2016 adalah sebesar 38,93 persen.

Berdasarkan hasil listing SE 2016 terdapat 72 usaha/perusahaan yang bergerak dalam kategori pertambangan, energi, pengolahan air dan limbah. Kategori ini menyerap sekitar 5,32 persen dari seluruh tenaga kerja kabupaten Halmahera Tengah di luar sektor pertanian. Kategori pertambangan, energi, pengolahan air dan limbah termasuk kategori usaha padat modal dimana kategori ini tidak menyerap banyak tenaga kerja namun memiliki kontribusi nilai tambah dan pertumbuhan perekonomian yang tinggi.

Khusus kategori pertambangan dan penggalian, Kabupaten Halmahera Tengah memiliki potensi di bidang pertambangan nikel. Sebelum adanya UU minerba, Kabupaten Halmahera Tengah memiliki setidaknya 3 perusahaan besar yang bergerak di bidang pertambangan nikel. Setelah UU minerba disahkan di tahun 2014, tersisa hanya 1 perusahaan besar yang membangun smelter di Kabupaten Halmahera Tengah sehingga masih beroperasi di bidang penggalian nikel pada tahun 2016.

Tabel 6.1
Kontribusi Total Sektor Pertambangan, energi, pengelolaan air dan limbah terhadap perekonomian di Kabupaten Halmahera Tengah
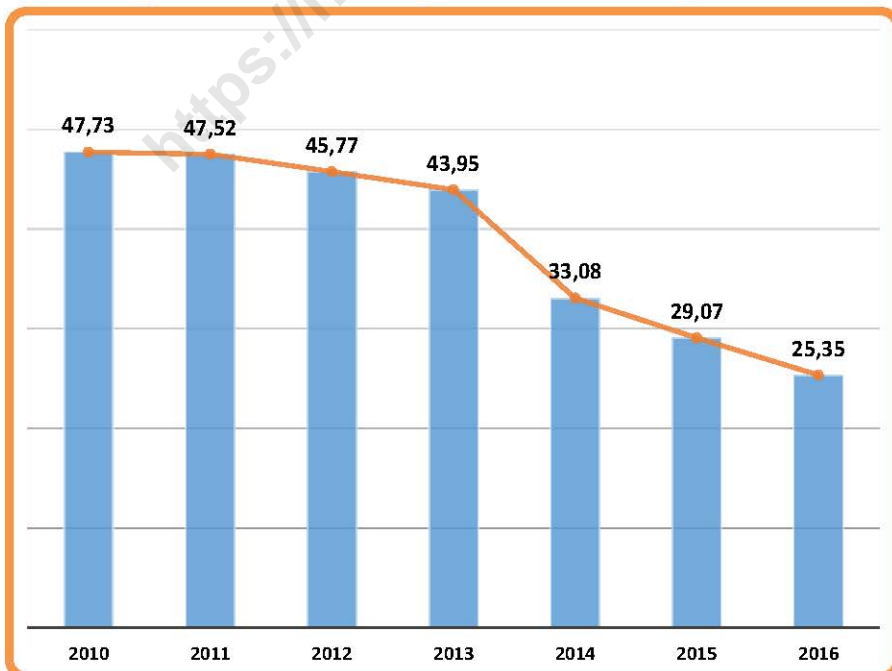
Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016 (diolah)

Meninjau pada laju pertumbuhan ketiga sektor ini menunjukan fluktuatif tiap tahunnya. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki tren laju pertumbuhan yang fluktuatif, sedangkan sektor energi serta pengelolaan air dan limbah menunjukan tren laju pertumbuhan yang meningkat. Penurunan laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian disebabkan karena produksi yang semakin menurun. Lebih khusus hal tersebut juga disebabkan karena adanya pemberlakuan UU minerba pada tahun 2014 sehingga mengalami penurunan produksi yang signifikan. Sedangkan cepatnya laju pertumbuhan sektor energi serta pengelolaan air dan limbah disebabkan karena adanya perluasan usaha dan peningkatan produksi PLN dan PDAM.Laju pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas selama periode 2012 sampai 2016 menunjukan pertumbuhan yang selalu meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya program percepatan pembangunan untuk daerah tertinggal supaya kebutuhan utama seperti listrik bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa ketersediaan energi khususnya listrik memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu wilayah. Adanya listrik selain akan memberikan efek multiplier terhadap perekonomian juga akan memengaruhi pola pikir masyarakat karena adanya informasi dari luar yang masuk melalui media sosial seperti Televisi.

Tabel 6.2

Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan, energi, pengelolaan air dan limbah terhadap perekonomian di Kabupaten Halmahera Tengah
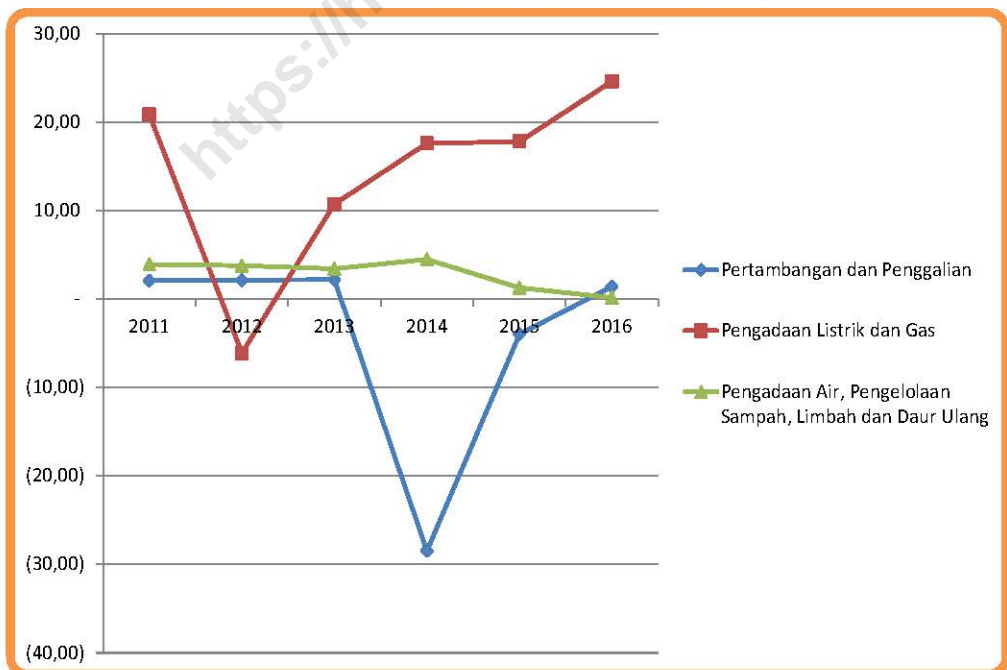
Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016 (diolah)

KESIMPULAN

KESIMPULAN:

1. Kabupaten Halmahera Tengah merupakan Kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Hal tersebut menandakan bahwa Kabupaten ini memiliki potensi ekonomi.

2. Terhitung berdasarkan hasil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Tengah. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2011 sebesar 19.247 jiwa. Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, sebesar 95,06 persen nya merupakan tenaga kerja, artinya hampir seluruh angkatan kerja tersebut merupakan sumber daya potensial untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Pada tahun-tahun berikutnya pun persentase tenaga kerja dari angkatan kerja nilainya selalu diatas 80 persen yaitu 90,29 persen, 92,15 persen, 95,10 persen dan 89,64 persen.

3. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Tengah masih relatif rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Maluku Utara. IPM Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 63,05 lebih kecil daripada IPM Provinsi Maluku Utara yang sebesar 66,63.

4. Kabupaten Halmahera Tengah perlu memprioritaskan sektor konstruksi dan sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, jasa lainnya sebagai sektor potensial. Sektor ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 17% dan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 14% di luar sektor pertanian. Sektor ini merupakan sektor basis/potensial yang mampu melayani pasar baik di dalam Kabupaten Halmahera Tengah sendiri maupun pasar di Provinsi Maluku Utara. Sektor ini juga memiliki laju pertumbuhan yang sangat baik karena merupakan potensi baik di tingkat lokal Halmahera Tengah maupun regional Maluku Utara.

Lampiran I
Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Halmahera Tengah

Indikator	Kategori Lapangan Usaha								
	B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	C. Industri Pengolahan	F. Konstruksi	G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	H, J. Pengangkutan dan pergudangan, Informasi dan Komunikasi	I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	K, L, M, N. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan	P. Pendidikan	Q, R, S, U. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial, Jasa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Persentase Tenaga Kerja	5,32	9,36	17,42	30,09	5,02	6,49	2,65	15,93	7,72

Lampiran II
Persentase Kontribusi Lapangan Usaha terhadap perekonomian di Kabupaten Halmahera Tengah

Indikator	Kategori Lapangan Usaha								
	B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	C. Industri Pengolahan	F. Konstruksi	G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	H, J. Pengangkutan dan pergudangan, Informasi dan Komunikasi	I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	K, L, M, N. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan	P. Pendidikan	Q, R, S, U. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial, Jasa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kontribusi PDRB	25,35	15,43	14,16	27,39	5,86	0,37	4,45	3,95	3,03

Lampiran III
Persentase Kontribusi Lapangan Usaha terhadap perekonomian di Kabupaten Halmahera Tengah

Indikator	Kategori Lapangan Usaha								
	B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	C. Industri Pengolahan	F. Konstruksi	G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	H, J. Pengangkutan dan pergudangan, Informasi dan Komunikasi	I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	K, L, M, N. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan	P. Pendidikan	Q, R, S, U. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial, Jasa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
LQ	√	-	√	-	-	-	-	-	√
Shift Share	√	-	-	√	-	-	-	-	-
MRP	-	-	√	√	√	-	√	-	√
Klassen	-	√	-	-	-	-	-	-	-
RPJMD Provinsi Maluku Utara			√						√

Keterangan: √ artinya memenuhi kategori unggulan dari masing-masing metode pengukuran